YASIN
Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya

p-ISSN: 2808-2346
e-ISSN: 2808-1854

Terindeks: SINTA 5, Copernicus, Dimensions, Scilit, Lens, Crossref, Semantic, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/yasin.v6i1.8831

PEMIKIRAN ETIKA MOHAMED ABID AL-JABIRI DAN RELEVANSINYA DENGAN FILM BIDAAH

Mohamed Abid Al-Jabiri's Ethical Thought and Its Relevance to the Film Bidaah

Ayyesa Afrilia Zalsabila[1], Fiqi Restu Subekti[2], Zuraida Nur Rahmawati[3]
[1,2]UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; [3]UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo
24205011006@student.uin-suka.ac.id; 24205011005@student.uin-suka.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Dec 4, 2025	Dec 29, 2025	Jan 10, 2026	Jan 15, 2026

Abstract

Although the cultic veneration of religious figures in popular culture has become increasingly widespread, studies that specifically examine the relevance of Mohamed Abid al-Jabiri's notion of rational ethics for reading ethical representations in popular media remain limited. This study aimed to identify how the Arab ethical values critiqued by al-Jabiri, including Persian, Greek, Sufi, pre-Islamic Arab heritage, and Qur'anic ethics are mobilized in the narrative elements, characterization, and dialogue of the film *Bidaah*. An interpretive qualitative method was employed, using film text analysis as the primary data source and al-Jabiri's works as the theoretical foundation. Data collection involved repeated viewing, scene coding, and triangulation of library sources, which were then thematically analyzed to map the ethical configurations presented in the film. The findings indicate that *Bidaah* exhibits problematic ethical patterns warned against by al-Jabiri, including total submission associated with Persian heritage, a tendency toward elitist rationality reflecting the influence of Greek heritage, and self-annihilating practices in Sufi variants, alongside forms of resistance rooted in Arab chivalric ethics and Qur'anic ethics of good deeds. In conclusion, al-Jabiri's framework of rational ethics proves relevant for popular culture analysis and is

Yasin Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

capable of explaining the symbolic and social mechanisms that sustain the cultic elevation of religious figures. The implications of this study include strengthening the theoretical grounding for research in ethical philosophy and film studies, as well as offering practical recommendations for enhancing religious and media literacy and reinforcing the accountability of charismatic figures in the public sphere.

Keywords: Mohamed Abid al-Jabiri; *Kritik Nalar Arab*; Rational Ethics; *Bidaah* Film; Religious Popular Culture

Abstrak: Meskipun praktik pengkultusan figur keagamaan dalam budaya populer semakin marak, kajian yang secara khusus menelaah relevansi gagasan etika rasional Mohamed Abid al-Jabiri dalam membaca representasi etis media populer masih terbatas. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bagaimana nilai-nilai etika Arab yang dikritik al-Jabiri, meliputi warisan Persia, Yunani, Sufi, Arab pra-Islam, dan etika Qur'ani termobilisasi dalam elemen naratif, karakterisasi, dan dialog film Bidaah. Studi ini menggunakan metode kualitatif interpretatif dengan analisis teks film sebagai data utama dan karya-karya al-Jabiri sebagai landasan teoritis. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penontonan berulang, pengodean adegan, dan triangulasi sumber pustaka, yang kemudian dianalisis secara tematik untuk memetakan konfigurasi etis yang ditampilkan film. Hasil penelitian menunjukkan bahwa film Bidaah menampilkan pola-pola etika problematik yang diperingatkan al-Jabiri, antara lain penyerahan total yang berkaitan dengan warisan Persia, kecenderungan rasionalitas elitis yang merefleksikan pengaruh warisan Yunani, serta praktik pembinasaan diri dalam varian Sufistik, bersamaan dengan hadirnya bentuk resistensi yang berakar pada etika kesatria Arab dan etika perbuatan baik Qur'ani. Kesimpulannya, kerangka etika rasional al-Jabiri terbukti relevan untuk analisis budaya populer dan mampu menjelaskan mekanisme simbolik serta sosial yang menopang proses pengkultusan figur keagamaan. Implikasi penelitian ini meliputi penguatan pijakan teoretis bagi studi filsafat etika dan kajian film, serta rekomendasi praktis untuk peningkatan literasi agama dan media serta penguatan akuntabilitas figur karismatik di ruang publik.

Kata Kunci: Mohamed Abid al-Jabiri; Kritik Nalar Arab; Etika Rasional; Film Bidaah; Budaya Populer Keagamaan

PENDAHULUAN

Kajian etika rasional menjadi semakin penting di era kontemporer karena praktik-praktik pengkultusan individu muncul dan berkembang di berbagai ranah sosial. Fenomena ini tidak hanya terjadi dalam konteks politik atau agama, tetapi juga meresap ke dalam budaya populer. Pengkultusan individu seringkali melemahkan kemampuan kritis masyarakat karena menempatkan figur tunggal sebagai sumber kebenaran yang tidak boleh dipertanyakan (Marske, 1987). Akibatnya, keputusan moral dan tindakan kolektif dapat dibentuk oleh retorika karismatik alih-alih pertimbangan rasional yang etis. Dalam situasi seperti ini, etika yang berpijak pada nalar menawarkan landasan untuk menilai klaim otoritas secara proporsional dan terbuka. Etika rasional mendorong dialog, pembuktian argumen, dan

tanggung jawab individu dalam menerima atau menolak tuntutan moral (Schmidt, 2024). Dengan demikian, penting untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip etika rasional dapat diperkuat agar ruang publik tidak mudah disesatkan oleh kultus pribadi.

Salah satu representasi pengkultusan individu dalam budaya populer dapat dilihat pada film Bidaah melalui tokoh Walid. Walid digambarkan sebagai figur karismatik yang mendapat pengikut setia karena klaim otoritas spiritual dan kepemimpinan yang tak terbantahkan (Ramadhan dkk., 2025). Dalam film tersebut, penggambaran ini menunjukkan mekanisme sosial yang membuat pengikut menerima ajaran tanpa verifikasi rasional. Adegan-adegan dan dialog yang menempatkan Walid pada posisi yang hampir tak tersentuh berfungsi memperkuat citra dirinya sebagai sumber kebenaran tunggal. Media sinematik seperti Bidaah memiliki kapasitas persuasi yang tinggi sehingga wajar bila film menjadi arena reproduksi pengkultusan. Karena itu, analisis film tidak hanya penting untuk kajian estetika, tetapi juga sebagai studi kasus fenomena etis dan sosial yang lebih luas. Temuan dari analisis semacam ini akan relevan untuk mengaitkan literatur etika rasional dengan praktik kehidupan nyata yang ditampilkan di layar.

Mohamed Abid al-Jabiri adalah seorang filsuf modern yang banyak membahas permasalahan nalar dalam tradisi Arab dan konsekuensinya bagi etika. Salah satu fokus pemikirannya adalah bagaimana nalar rasional perlu menjadi fondasi dalam membentuk sikap moral yang kritis dan mandiri. Melalui konsep etika rasionalnya memungkinkan masyarakat menilai klaim-klaim otoritatif berdasarkan bukti dan rasio. Pendekatan ini bertentangan dengan gaya berpikir yang mengutamakan otoritas personal atau pengalaman mistik sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, masyarakat diharapkan mampu menghindari manipulasi dan tidak mudah jatuh pada pengkultusan individu. Etika rasional al-Jabiri juga menekankan pentingnya pendidikan kritis dan pembentukan ruang dialog yang terbuka (Qosim & Amin, 2025). Oleh karena itu, konsepnya relevan untuk membaca wacana yang diproduksi oleh media, termasuk film yang memikat emosi penonton.

Tinjauan literatur menunjukkan bahwa banyak penelitian sebelumnya fokus pada kritik al-Jabiri terhadap nalar Arab secara historis dan epistemologis, salah satunya penelitian yang dilakukan Muhamad (2024). Penelitian yang dilakukan Zuhri (2008) dan Basayif (2023) memang menyentuh aspek etika dalam pemikirannya, tetapi cakupannya cenderung normatif dan tidak selalu diaplikasikan pada kajian media. Sebaliknya, penelitian tentang film Bidaah

yang dilakukan Ramadhan dkk. (2025); Najmiah & Ridho (2025); dan Denilza & Muzakir (2025) umumnya membahas aspek naratif, representasi, atau sosiokultural tanpa menggunakan konsep etika al-Jabiri. Hal ini memberikan celah metodologis, yaitu belum banyak kajian yang menghubungkan teori etika rasional al-Jabiri dengan film Bidaah yang memperlihatkan pengkultusan. Keterbatasan ini membuat pemahaman kita tentang bagaimana nilai-nilai etika yang dikritik al-Jabiri direproduksi dalam budaya populer menjadi terbatas. Untuk mengisi jurang penelitian tersebut, diperlukan studi interdisipliner yang menggabungkan teori filsafat etika dengan analisis film dan kajian budaya. Penelitian ini hadir sebagai upaya menjembatani dua tradisi kajian tersebut dengan menggunakan film Bidaah sebagai studi kasus empiris.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana nilai-nilai etika Arab yang dikritik oleh al-Jabiri tercermin dalam film Bidaah. Secara khusus penelitian akan mengidentifikasi elemen-elemen naratif, karakterisasi, dan dialog yang memanifestasikan etika yang dinilai problematik oleh al-Jabiri. Dengan pemetaan tersebut, studi ini hendak menunjukkan pola-pola reproduksi etika yang mengabaikan nalar rasional. Hasil penelitian diharapkan membantu masyarakat membedakan antara etika yang dapat diterima dan etika yang perlu ditolak dari perspektif al-Jabiri. Implikasinya bukan hanya teoritis, tetapi juga praktis karena mempromosikan pendidikan etika rasional dan kesadaran media di kalangan penonton. Dengan demikian, kajian ini ingin memberi kontribusi terhadap wacana kritis yang mendorong penguatan nalar publik dalam menghadapi figur-figur yang berpotensi dikultuskan. Oleh karena itu, diharapkan temuan ini mendorong pembaca untuk lebih reflektif terhadap klaim otoritas dalam kehidupan nyata dan representasinya di layar.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis interpretatif untuk menelaah bagaimana gagasan etika rasional Mohamed Abid al-Jabiri direpresentasikan dalam film *Bidaah*. Fokus kajian diarahkan pada alur cerita, dialog, karakter, dan elemen visual yang menggambarkan pola etika tertentu. Data utama diambil dari kitab *al-'Aql al-Akhlāqī al-'Arabī* karya al-Jabiri yang membahas tentang etika. Data utama juga diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap adegan film, sedangkan data pendukung dikumpulkan dari literatur akademik, resensi film, dan dokumen lain yang relevan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menonton film secara berulang dan mencatat bagian-

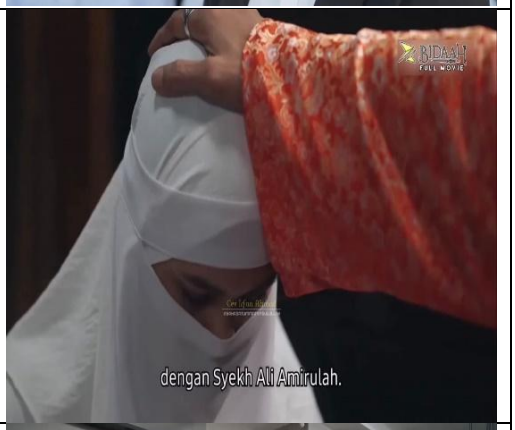
bagian yang signifikan. Analisis data dilakukan melalui tahap penyederhanaan informasi, pengkodean adegan, pengelompokan kode sesuai kategori etika dalam kerangka teori al-Jabiri, serta penyusunan tema untuk memahami hubungan antara film dan konsep etika rasional. Upaya menjaga keabsahan penelitian dilakukan melalui triangulasi sumber, pencatatan proses kerja secara sistematis, dan penyajian konteks yang memadai.

HASIL

Penelitian ini menemukan bahwa film *Bidaah* merepresentasikan praktik keagamaan yang didominasi oleh otoritas religius melalui etika penyerahan diri yang meniadakan rasionalitas dan otonomi moral jamaah, sebagaimana dikritik dalam pemikiran etika Mohamed Abid al-Jabiri. Persilangan warisan etika Persia dan Sufi dalam film tampak melalui ritual dan simbol kesucian yang berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan, sementara tindakan filantropis tokoh agama merepresentasikan etika kebahagiaan yang bersifat ambigu dan instrumental. Di tengah dominasi tersebut, film juga menampilkan resistensi etis berbasis etika Qur'ani yang menegaskan ketaatan hanya kepada Tuhan dan penolakan terhadap praktik keagamaan yang merendahkan martabat manusia. Temuan ini menegaskan relevansi pemikiran al-Jabiri dalam membaca film *Bidaah* sebagai kritik kultural terhadap krisis etika keagamaan yang lahir dari dominasi tradisi tanpa nalar kritis. Berikut adalah bentuk-bentuk representasinya dalam film *Bidaah*:

Tabel 1. Representasi Sumber Budaya Etika Arab dalam Film Bidaah

Sumber Budaya Etika Arab	Representasinya dalam Film Bidaah	Scene/Adegan Film
Warisan Persia: Etika Penyerahan Total	Jama'ah Jihad Ummah patuh dan taat untuk mencuci kaki Walid dan meminum bekas air cuciannya	

	Istri-istri Walid yang tidak mendapatkan keadilan nafkah batin, pasrah begitu saja karena Walid melegitimasi pernikahannya melalui perintah dari Rasulullah sehingga tidak boleh dibantah apapun yang menjadi keputusan Walid	
	Berkat otoritas keagamaan Walid, Tan Sri rela menyumbangkan gedung dan bangunannya untuk perjuangan dakwah Walid	
	Jama'ah perempuan merasa senang dipilihkan suami oleh Walid, meskipun usia calon suaminya lebih tua daripada mereka. Hal ini semata-mata pilihan Walid merupakan berkah bagi mereka	
	Ibu Baiduri lebih patuh terhadap perintah Walid daripada patuh terhadap suaminya, bahkan seringkali menentang perintah suaminya	

	Jamaah perempuan mematuhi Walid untuk melepas cadarnya di hadapan Walid	
	Jamaah laki-laki melaksanakan perintah Walid untuk memasukan bekas air mandi Walid dan Rabiatul (istri kedua) ke dalam sumur yang biasa dikonsumsi para jama'ah	
	Dewi patuh dan sukarela dinodai Walid dengan dalih bahwa Allah mengirimkan dewi untuk Walid	
Warisan Sufi: Etika Pembinasaan Diri	Rutin melakukan ritual seperti ritual Malam Berkah dan ritual Malam Bahtera Melayu	
Warisan Yunani: Etika Kebahagiaan	Walid mendirikan panti asuhan gratis bagi anak-anak yatim piatu dan anak-anak brokenhome	
Warisan Arab Murni: Etika Ksatria	Ketika Baiduri disuruh mencuci kaki Walid dan meminum bekas air cuciannya, Baiduri menolaknya bahkan menyiramkan bekas air tersebut ke muka Walid	

	Baiduri mengumpulkan jama'ah perempuan yang masih muda untuk menasehati mereka agar seorang perempuan memiliki martabat dan harga diri sehingga tidak mudah diperalat oleh orang lain	
Warisan Agama (Islam): Etika Qur'ani	Masyitah (istri ketiga) menganggap bahwa Walid telah melampaui batas karena berduaan dengan seseorang yang bukan mahramnya	
	Hambali dalam setiap ceramahnya selalu mengajarkan untuk taat mutlak hanya kepada Allah dan Rasul-Nya	

Sumber: Channel Youtube Rozaidi Store
(https://youtu.be/6AIR9r9ctb0?si=_RxUQ9hkHZ1V-5fI)

PEMBAHASAN

Biografi Mohamed Abid al-Jabiri

Mohamed Abid al-Jabiri adalah seorang filsuf Arab kontemporer. Ia dilahirkan di kota Figuig, Maroko, pada 27 Desember 1936 dan wafat pada 3 Mei 2010. Pendidikan dasar al-Jabiri ditempuh di madrasah Hurrah Wataniyyah, sebuah sekolah agama swasta yang didirikan oleh kelompok oposisi dalam konteks perjuangan kemerdekaan. Setelah itu ia melanjutkan pendidikan menengah di Casablanca pada 1951-1953 dan memperoleh diploma Arabic High School setelah Maroko meraih kemerdekaan.

Ketertarikan al-Jabiri terhadap filsafat tampak sejak awal masa pendidikannya. Studi filsafatnya dimulai pada 1958 di Universitas Damaskus, Suriah. Namun ia tidak lama menempuh studi di sana. Setahun kemudian ia pindah ke Universitas Rabat yang baru berdiri. Ia menyelesaikan program magisternya pada 1967 dengan tesis berjudul *"Falasafah al-Tarikh*

'inda Ibn Khaldūn." Gelar doktor diperolehnya pada 1970 dari Universitas Muhammad V Rabat dengan disertasi *"Al-'Asabiyyah wa ad-Dawlah: Ma'ālim Nazariyyah Khaldūniyyah fī al-Tārīkh al-Islāmī* (Al-Jabiri, 2003: vii-viii)."

Sejak muda al-Jabiri aktif dalam kegiatan politik dan condong kepada ideologi sosial. Ia pernah terlibat dalam partai *Union Nationale des Forces Populaires* yang kemudian berganti nama menjadi *Union Socialiste des Forces Populaires* (USFP). Pada 1975 ia menjadi anggota biro politik USFP (Faisol, 2010). Di samping keterlibatan politik, ia juga berperan aktif dalam dunia pendidikan. Sejak 1964 ia mengajar filsafat di tingkat menengah dan turut serta dalam program-program pendidikan nasional. Pada 1966, bersama Mustafa al-Qamari dan Ahmed Sattati, ia menerbitkan dua buku teks: satu tentang pemikiran Islam dan satu lagi mengenai filsafat untuk mahasiswa.

Latar pemikiran al-Jabiri banyak dipengaruhi oleh Marxisme, yang pada masa itu menjadi arus intelektual penting di dunia Arab. Ia sendiri mengakui kekaguman terhadap pemikiran Marx. Kondisi Maroko sebagai bekas protektorat Prancis memudahkannya mengakses literatur berbahasa Prancis. Oleh karena itu, ia sering meminjam pendekatan strukturalis dan pasca-modernis yang berkembang di Prancis (Soleh, 2003: 232).

Berdasarkan metode yang dikembangkannya, al-Jabiri mengarahkan kajiannya pada kebudayaan dan tradisi pemikiran Islam. Namun ia membatasi kajiannya pada Islam-Arab, yakni teks-teks yang ditulis dalam bahasa Arab, sehingga tidak memasukkan karya-karya non-Arab seperti teks berbahasa Persia meskipun ditulis oleh cendekiawan Muslim. Selain itu ia menekankan kajian pada ranah epistemologi, yaitu mekanisme berpikir yang menguasai kebudayaan Arab pada periode-periode tertentu.

Karya-karyanya yang telah dipublikasikan secara luas meliputi trilogi Kritik Nalar Arab *(Takwīn al-'Aql al-'Arabī, Binyat al-'Aql al-'Arabī,* dan *al-'Aql al-Siyāsī al-'Arabī), al-Khiṭāb al-'Arabī al-Ḥadāthah, al-Fikr al-'Arabī al-Mu'āṣir, al-Mas'alah al-Thaqāfiyyah, Mas'alat al-Huwiyyah, al-'Aql al-Akhlāqī al-'Arabī,* dan *al-Muthaqqafūn al-'Arab fī al-Ḥaḍārah al-Islamiyyah* (Khairina, 2016). Karya-karya tersebut kemudian menjadi rujukan penting dalam studi pemikiran Arab kontemporer.

Sumber Budaya Etika Arab menurut al-Jabiri

Dalam karyanya yang berjudul *al-'Aql al-Akhlāqī al-'Arabī*, menurut al-Jabiri, etika Arab tidak lahir dari satu sumber saja. Ia terbentuk dari percampuran lima warisan budaya

yang berbeda. Warisan Persia membawa etika penyerahan, yaitu pandangan bahwa rakyat harus tunduk sepenuhnya pada penguasa. Warisan Yunani menyumbang etika kebahagiaan yang menekankan rasionalitas dan kehidupan bersama di kota. Warisan Sufi mengenalkan etika pembinasaan diri, yang mendorong orang menjauh dari dunia dan lebih sibuk dengan pengalaman batin. Di sisi lain, warisan Arab pra-Islam memberikan etika kesatria, yang menekankan keberanian dan kehormatan. Dan terakhir, warisan Islam Qur'ani menghadirkan etika perbuatan baik sebagai ekspresi ketakwaan.

1. Warisan Persia: Etika Penyerahan Total

Al-Jabiri mengatakan ada tradisi penyerahan dalam budaya Arab yang mirip dengan cara raja-raja Persia memerintah. Tradisi itu jadi pusat kehidupan sosial dan pengaruhnya lebih besar dibanding nilai lain (Al-Jabiri, 2001: 227). Ia melihat dukungan pada penyerahan tanpa syarat kian meluas. Padahal, menurut Al-Quran, penyerahan seharusnya bersyarat, bukan tunduk begitu saja tanpa batas. Al-Jabiri juga menunjuk peran birokrat negara yang gencar menyebarkan gagasan ini. Ia menyebut praktik itu al-tarassul atau semacam komisioning. Karena dipromosikan oleh negara, penyerahan itu diberi nuansa suci sehingga sulit dipertanyakan. Akibatnya, ketaatan kepada raja sering disamakan dengan ketaatan kepada Tuhan.

Posisi raja jadi diberi aura Ilahi dalam praktik sosial, dan rakyat diposisikan sebagai pengikut yang wajib tunduk. Kebahagiaan orang akhirnya diukur dari seberapa taat mereka kepada penguasa, bukan dari kebebasan atau keadilan. Semakin otoriter penguasa, semakin dianggap benar untuk ditaati tanpa syarat. Penyerahan itu lalu menjadi tujuan sendiri, yaitu menundukkan orang lain dibenarkan supaya mereka terus tunduk. Dampaknya, ruang kritik dan kebebasan sosial menyusut, dan kehidupan politik kehilangan imajinasi tentang masa depan yang lebih adil.

Intinya, al-Jabiri menekankan bahwa beberapa penguasa Muslim mulai meniru cara raja-raja Persia yang berkuasa mutlak. Saat ia bilang Khalifah Umayyah seperti Khusraw dan Abu Ja'far al-Mansur seperti Ardashir, maksudnya gaya pemerintahan mereka mirip, yakni penuh simbol kebesaran, upacara, dan tuntutan ketaatan tanpa batas. Oleh karena itu, penyerahan kepada penguasa jadi dipandang suci. Jadi fokusnya bukan lagi pada hubungan adil antara rakyat dan pemimpin, melainkan pada menjaga ritual ketaatan itu sendiri. Dari situ muncul peluang bagi kelompok tertentu untuk mengganti figur raja dengan figur religius yang

dipuja, yaitu Imam. Dengan kata lain, model kekaisaran itu dipindahkan ke ranah agama (Al-Jabiri, 2001): 231.

Kelompok Syiah memanfaatkan peluang itu untuk menempatkan Imam pada posisi sangat tinggi, sampai hampir dipandang suci seperti Tuhan. Perlu dicatat, memuja pemimpin sampai setingkat Tuhan adalah hal yang jarang terjadi dalam tradisi Arab dan Muslim awal. Meski begitu, gagasan ini tidak tinggal di satu kelompok, ia juga menyebar ke sebagian kelompok Sunni dan memengaruhi struktur sosial-politik. Akibatnya, ruang kritik menyusut dan harapan tentang perubahan sosial ikut pudar. Al-Jabiri menyebut kondisi seperti ini "Kota Khusraw" (kota yang membuat orang kehilangan mimpi). Singkatnya, kultus ketaatan mengubah pemimpin jadi figur tak tersentuh, sementara masyarakat jadi pasrah dan kehilangan imajinasi akan masa depan yang lebih adil (Al-Jabiri, 2001: 254).

2. Warisan Yunani: Etika Kebahagiaan

Al-Jabiri mengatakan ada dua cara berbeda dalam mencari nilai hidup, yaitu melalui warisan Persia dan warisan Yunani. Dalam tradisi Persia, penekanan utama adalah penyerahan kepada penguasa. Artinya, ketaatan dipakai sebagai alat untuk membangun dan mempertahankan kekaisaran. Sedangkan dalam tradisi Yunani, perhatian lebih kepada pencarian etika lewat filsafat, yakni bagaimana memahami alam semesta dan hidup yang baik, bukan soal memperluas kekuasaan. Jadi tujuan budaya Persia bersifat politik dan hierarkis, sementara tujuan budaya Yunani lebih bersifat intelektual dan individual. Perbedaan ini juga tampak pada gagasan tentang negara. Dalam pemikiran Yunani, negara idealnya bukan kerajaan besar melainkan sebuah kota-polis yang mengutamakan warga sebagai anggota aktif komunitas. Polis dipandang sebagai tempat pertemuan warga, di mana kehidupan bersama dan partisipasi warga jadi pusatnya. Sementara model Persia menempatkan penguasa dan struktur kekuasaan di depan, menekankan ketaatan lebih dari kebebasan warga.

Menurut al-Jabiri, ide-ide Yunani masuk ke dunia Islam lewat karya-karya filsuf Arab. Ia membaca karya-karya al-Kindi, Ibn Rusyd, al-Farabi *(al-Madinah al-Fadilah)*, serta karya Ibn Miskawaih tentang penyempurnaan akhlak. Pemikiran Yunani menaruh perhatian pada etika, akal, dan bagaimana hidup baik, bukan pada membangun kekaisaran atau menuntut penyerahan. Para filsuf Muslim tersebut kemudian menyesuaikan dan mengembangkan gagasan-gagasan itu dalam bahasa dan konteks Islam. Al-Jabiri melihat karya-karya mereka sebagai jalur pemikiran alternatif yang menekankan warga, etika, dan kehidupan publik. Jadi bukan soal meniru Yunani bulat-bulat, tapi mengolah ide-idenya agar berguna di masyarakat

Islam (Al-Jabiri, 2001: 257). Hal ini menunjukkan ada tradisi intelektual yang berbeda dari budaya penyerahan politik.

Puncaknya, menurut Al-Jabiri, muncul sosok ideal kaum intelektual yang ia sebut Muthaqqaf al-Muqabassat pada abad ke-4 H. Contoh paling menonjol dari tipe ini adalah Abu Hayyan al-Tawhidi, pengarang al-Maqamat, yang dipandang berpikir kritis, peka budaya, dan menulis tentang kehidupan serta moral. Ibn Miskawaih juga termasuk, karyanya tentang etika dimasukkan ke dalam tradisi yang sama. Al-Jabiri mengatakan mereka bukan sekadar meniru gagasan asing, melainkan menyerap dan mengubahnya agar relevan dengan dunia Islam. Hasilnya adalah kelompok intelektual yang menempatkan akal, etika, dan peran warga di pusat kehidupan sosial (Al-Jabiri, 2001: 420). Singkatnya, Al-Jabiri menunjukkan bahwa pengaruh Yunani melahirkan model intelektual berbeda yang berfokus pada moral dan masyarakat, bukan pada kekuasaan.

3. Warisan Sufi: Etika Pembinasaan Diri

Al-Jabiri berpendapat bahwa warisan Sufi menonjolkan penyerahan lewat hubungan dekat antara mursyid dan murid. Dalam beberapa aliran Sufi ada konsep pembinasaan diri atau fana, yaitu menghapuskan ego supaya "bersatu" dengan Tuhan, dan itu berbeda dari kebiasaan sosial-religius Arab yang lebih menekankan keseimbangan antara ibadah dan kehidupan sehari-hari. Menurut al-Jabiri, etika pembinasaan ini tidak sama dengan etika yang muncul dari Al-Qur'an, perilaku Nabi, dan praktik ibadah umum umat Islam. Dalam tradisi Qurani, ibadah dan kehidupan duniawi punya batas dan fungsi yang jelas, tidak ada ajakan untuk menghilangkan diri sampai lenyap sepenuhnya. Selain itu, dalam praktik tertentu hubungan mursyid-murid bisa memberi otoritas besar pada mursyid, sampai pengikutnya siap menanggalkan kehendak sendiri demi petunjuk sang mursyid. Al-Jabiri melihat hal ini bukan cuma soal spiritualitas, tetapi juga soal bagaimana masyarakat memandang otoritas dan kebebasan individu (Al-Jabiri, 2001: 430). Jadi ia mengingatkan agar kita hati-hati pada bentuk-bentuk penyerahan yang menghapus ruang kritik dan keputusan pribadi.

Lebih jauh lagi, al-Jabiri menegaskan pembinasaan berpotensi bertentangan dengan doktrin tauhid, yaitu keesaan Tuhan yang mutlak. Tauhid menuntut bahwa Tuhan itu unik dan tak bisa disamakan atau disejajarkan dengan apa pun, ada jarak ontologis yang jelas antara Pencipta dan makhluk. Jika praktik pembinasaan atau pemuliaan mursyid sampai memberi posisi hampir Ilahi pada manusia, maka itu mendekati syirik (menyekutukan Tuhan atau menempatkan sesuatu setara dengan Tuhan). Ia khawatir pemuliaan semacam itu

mengaburkan batas antara hamba dan Tuhan dan bisa dipakai untuk melegitimasi otoritas politik atau sosial. Kritik al-Jabiri bukan berarti menolak semua Sufisme, melainkan menolak bentuk-bentuk yang mengangkat manusia ke posisi yang hanya pantas bagi Tuhan (Al-Jabiri, 2001: 409). Intinya, menurut al-Jabiri, menjaga batas antara pengalaman spiritual dan penobatan manusia penting agar doktrin keesaan Tuhan tetap terjaga. Kalau batas itu hilang, agama mudah jadi alat kekuasaan, bukan jalan spiritual yang membebaskan.

Para Sufi memberi arti baru pada konsep tauhid atau kesatuan yang sering disebut "ittihad" atau "wahda" dengan memasukkan gagasan pembinasaan diri (fana), yaitu meleburkan ego sampai bersatu dengan Tuhan. Menurut al-Jabiri, makna macam ini sebenarnya bukan bagian dari ajaran Islam asli dan juga bukan sesuatu yang dikenal oleh orang Arab pra-Islam. Tradisi ini justru malah menjaga jarak antara manusia dan Tuhan, dan hubungan keagamaan seringkali lewat perantara seperti berhala. Jadi al-Jabiri berpikir cara Sufi memahami "kesatuan" itu menambah arti baru yang tidak muncul dari Al-Qur'an, sunnah, atau praktik keagamaan Arab awal. Karena itu ia menolak klaim klasik Sunni yang bilang Sufisme tumbuh secara alami dari hukum Islam. Menurutnya klaim itu muncul kemudian sebagai upaya Sunni untuk membenarkan posisi Sufi (Al-Jabiri, 2001: 409).

Al-Jabiri mempertanyakan apabila gagasan pembinasaan diri bukan berasal dari budaya Islam murni atau budaya Arab murni, lalu dari mana? Ia menunjuk kemungkinan masuknya ide asing lewat Persia atau Yunani. Memang, ia mengakui ada titik temu antara beberapa pikiran Yunani dengan gagasan Sufi. Namun ia lebih menaruh curiga pada pengaruh budaya Persia. Menurutnya Persia-lah yang banyak menyebarkan model spiritual dan etika pembinasaan diri ke dalam dunia Islam (Al-Jabiri, 2001: 441). Singkatnya, al-Jabiri melihat Sufisme versi tertentu bukan sebagai kelahiran internal masyarakat Arab, melainkan sebagai hasil impor budaya yang kemudian diadaptasi dan memberi dampak besar pada cara orang Arab berpikir tentang spiritualitas dan otoritas.

4. Warisan Arab Murni: Etika Ksatria

Al-Jabiri melihat kesatria sebagai nilai pusat dalam etika aristokrat Arab karena sering muncul dan dipuji dalam sastra Arab. Karena aristokrasi begitu melekat pada budaya Arab, mudah bagi elite menjadikan kesatria sebagai warisan pra-Islam yang terus dipertahankan. Bagi mereka, kesatria bukan cuma soal perilaku mulia, tapi juga identitas budaya yang membuktikan siapa "orang Arab sejati." Aristokrat menggunakan citra ini untuk mengatakan bahwa inilah etika Arab yang benar, sebelum dan setelah Islam. Akibatnya, kesatria jadi

standar moral yang diharapkan mewakili seluruh masyarakat, meskipun asalnya dari kelompok tertentu. Al-Jabiri menegaskan bahwa ini lebih sebagai konstruksi sosial daripada sifat bawaan bangsa. Dengan klaim seperti itu, tanpa nilai kesatria, kota Arab yang berbudi dianggap gagal.

Al-Jabiri menunjukkan bahwa nilai kesatria diperlakukan seolah-olah melekat pada bangsa Arab secara keseluruhan, bukan hanya milik aristokrat. Akibatnya nilai-nilai elit itu bertahan dari masa Umayyah sampai ke zaman modern, dipakai sebagai ukuran "martabat" kota dan masyarakat. Ini sekaligus jadi alat legitimasi bagi kekuasaan elite dengan menjadikan kebajikan mereka sebagai alasan agar tetap berkuasa.

Al-Jabiri mengatakan ketika mengaitkan "kota berbudi" dengan nilai kesatria, kita sebenarnya menyatukan etika dan politik. Artinya, cara berkuasa harus dinilai dari standar moral, bukan cuma efisiensi atau kekuasaan. Ia melihat banyak pemikir Barat (Machiavelli) dan beberapa intelektual Arab modern yang memisahkan etika dari politik. Politik dianggap urusan teknik kekuasaan, sementara etika dianggap urusan pribadi atau teori. Akibatnya, banyak kesalahan penguasa bisa dibenarkan dengan alasan stabilitas. Al-Jabiri menolak pembenaran itu, ia ingin kembali ke pandangan lama yang bilang politik idealnya berakar pada etika. Dengan cara ini, politik bukan arena bebas untuk melakukan apa pun demi kepentingan penguasa. Sebaliknya, politik harus melayani kebaikan bersama dan aturan moral yang jelas. Jadi mengaitkan kesatria dengan kota berbudi berarti menuntut pemimpin yang bermoral, bukan sekadar kuat.

Konsekuensinya jika etika dipisahkan dari politik, para penjaga tatanan baru bisa menegakkan kekuasaan tanpa bertanggung jawab, dan masyarakat kehilangan standar untuk menilai kebijakan. Al-Jabiri ingin agar setiap tindakan politik diuji menurut prinsip-prinsip moral yang membangun kehidupan kota (partisipasi warga, keadilan, dan kehormatan publik). Menyatukan kembali etika dan politik membuat pemimpin harus mempertimbangkan baik buruknya kebijakan, bukan hanya apakah kebijakan itu mempertahankan kekuasaan. Itu juga menegakkan gagasan bahwa tatanan publik punya tujuan moral, bukan sekadar stabilitas teknis. Singkatnya, menurut Al-Jabiri, politik tanpa etika adalah resep untuk dominasi dan penyerahan, bukan untuk kota yang benar-benar "berbudi." Jika ingin kota yang layak dihuni, politik harus kembali punya kompas moral (Al-Jabiri, 2001: 592).

5. Warisan Agama (Islam): Etika Qur'ani

Al-Jabiri menjelaskan konsep ketakwaan sebagai nilai sentral dalam budaya Islam murni. Ia berpandangan bahwa iman dalam Islam selalu dikaitkan dengan perbuatan baik, "Orang-orang beriman dan mereka yang melakukan perbuatan baik" sering disebut bersama. Al-Jabiri menyimpulkan bahwa perbuatan baik adalah pusat nilai-nilai Qurani Islam. Ketika iman dan perbuatan baik digabungkan, maka akan menghasilkan nilai-nilai agama yang dilihat sebagai yang paling mulia, yakni ketakwaan. Al-Jabiri menulis:

"Konteks-konteks di mana nilai ini muncul semuanya menunjukkan bahwa ketakwaan bukan sekadar kebajikan yang menghubungkan individu beriman dengan Tuhan, ia juga menjangkau orang lain, ke masyarakat. Ketakwaan sebagai nilai utama dalam semua agama; kekhasan Islam adalah bahwa ketakwaan didasarkan pada perbuatan baik. Jelas bahwa ketakwaan adalah nilai sentral dalam Islam seperti halnya agama lain, perbuatan baik adalah nilai etis sentral terkait etika Islam. Oleh karena itu etika ini seharusnya disebut etika perbuatan baik (Al-Jabiri, 2001: 594)."

Konsep Etika Ideal menurut al-Jabiri

Al-Jabiri menempatkan kritiknya terhadap warisan Persia dan sebagian tradisi Sufi bukan sekadar sebagai penilaian historis, tetapi sebagai analisis mendalam tentang bagaimana warisan intelektual tertentu dapat membentuk pola pikir dan perilaku sosial-politik umat. Menurutnya, warisan Persia yang sarat dengan budaya istana, hierarki kaku, dan loyalitas personal kepada penguasa telah menanamkan pola kepatuhan buta yang menyingkirkan kontrol publik terhadap kekuasaan (Al-Jabiri, 2001: 231). Dalam model ini, stabilitas diprioritaskan dibandingkan akuntabilitas, sehingga kritik sering dianggap sebagai ancaman, bukan bagian dari mekanisme perbaikan. Di sisi lain, sebagian etika sufistik, khususnya yang menekankan pengosongan diri, fana', dan penyerahan total sering dipraktikkan dengan cara yang membuat umat menjauh dari keaktifan sosial (Thibdeau, 2025). Spiritualitas seringkali dipahami sebagai pelarian dari persoalan dunia, bukan sebagai pendorong tanggung jawab moral dan sosial.

Kedua arus ini, ketika bertemu dalam sejarah peradaban Islam, menurut al-Jabiri menghasilkan kultur politik yang cenderung otoriter. Ketaatan lebih dipuji daripada keberanian moral, dan pasivitas lebih dihargai daripada keterlibatan kritis. Akibatnya, ruang publik untuk berpikir, berdialog, dan mengontrol kekuasaan menjadi semakin sempit. Karena itu, kritik al-Jabiri bukan hanya upaya membongkar kelemahan warisan lama, tetapi ajakan

untuk membangun kembali etika politik yang berlandaskan rasionalitas, ijtihad, dan tanggung jawab sosial sebagai fondasi budaya politik yang sehat dan demokratis.

Pandangannya terhadap warisan Yunani, al-Jabiri menghargai potensi Yunani untuk membangun etika sipil, tetapi menyesalkan bagaimana beberapa pemikir memilih versi Yunani yang paling mudah disalahgunakan yang akhirnya memperkuat legitimasi penguasa despotik. Pemahaman terhadap warisan Yunani dalam tradisi etika Islam mengalami penyimpangan ketika gagasan kebahagiaan yang awalnya berhubungan dengan kehidupan warga kota justru dipadukan dengan tradisi politik Persia yang bersifat otoriter (Belhaj, 2024). Perpaduan ini membuat etika kebahagiaan berubah fungsi: bukan lagi sebagai dasar bagi kehidupan publik yang aktif, tetapi menjadi alat yang mendukung kekuasaan.

Dalam proses tersebut, makna kebahagiaan dialihkan dari tujuan sosial menjadi janji akhirat atau digantungkan pada sosok penguasa yang dianggap sebagai sumber ketertiban. Al-Jabiri mengkritik para pemikir yang menyebarkan pandangan ini, terutama ketika mereka menggunakan simbolisme seperti perumpamaan raja sebagai matahari yang menjadi pusat kehidupan masyarakat (Al-Jabiri, 2001: 420). Baginya, cara berpikir seperti itu menghapus peran warga dan memperkuat dominasi politik. Karena itu, ia menekankan perlunya mengembalikan konsep kebahagiaan kepada makna awalnya, yaitu sebagai tujuan bersama yang dibangun melalui akal, partisipasi, dan tanggung jawab publik, bukan sebagai pembenaran bagi kekuasaan yang tidak dapat dikritik.

Di sisi lain, al-Jabiri justru memberi penghargaan tinggi kepada dua warisan lainnya yang menurutnya bersifat proaktif dan membangun, yaitu etika kesatria dari tradisi Arab murni dan etika perbuatan baik yang diajarkan Al-Qur'an. Etika kesatria menanamkan sifat-sifat kebajikan publik, seperti keberanian menghadapi ketidakadilan, kejujuran dalam tutur dan perbuatan, serta tanggung jawab terhadap komunal, sehingga membentuk karakter individu yang siap menegakkan kebenaran dan mempertahankan martabat kolektif. Sementara itu etika Qurani menegaskan bahwa iman tanpa tindakan adalah kosong. Keimanan harus diwujudkan dalam amal sosial yang konkret. seperti memberi pertolongan, menegakkan keadilan, melindungi kaum lemah, sebagai bukti ketaatan kepada nilai-nilai Ilahi (Heravi, 2023). Bagi al-Jabiri, kombinasi keduanya bersifat saling menguatkan. Semangat kesatria menyediakan energi moral dan keberanian, sedangkan etika Qurani memberi arah normatif dan tujuan sosial sehingga keberanian itu diarahkan untuk kebaikan bersama, bukan sekadar heroisme individual.

Konsepsi ini membuat al-Jabiri optimis bahwa perubahan sosial yang nyata hanya bisa muncul bila budaya politik menyokong agen-agen moral yang aktif, yakni warga yang berani bersuara, bersedia bertindak, dan mengikat tindakannya pada prinsip-prinsip keadilan yang diajarkan agama. Dengan menegakkan kembali nilai-nilai kesatria dan etika Qurani, masyarakat memperoleh landasan untuk membangun institusi pengawas, tradisi ijtihad kritis, dan praktik kewargaan yang menolak pasifisme. Singkatnya, al-Jabiri melihat kedua warisan ini bukan sebagai nostalgia ke masa lalu, tetapi sebagai sumber daya normatif yang dapat menghidupkan kembali energi moral kolektif dan menjadi motor perubahan menuju masyarakat yang lebih adil dan akuntabel.

Analisis Film Bidaah melalui Konsep Etika Ideal al-Jabiri

Film Bidaah bukan sekadar produk imajinasi belaka, namun lebih ke representasi sinematik yang berpijak pada realitas empiris. Pernyataan itu diperkuat oleh Erma Fatima sebagai produser dan penulis naskah, yang menyatakan bahwa narasi film berakar pada pengalaman pribadi dan observasi mendalam selama penelitiannya di berbagai pesantren (Ridwan, 2025). Oleh karena itu, meskipun alur dramatik memasukkan unsur fiksi berupa sekte rekaan, namun inti cerita dimaksudkan untuk merefleksikan dinamika nyata penyimpangan ajaran agama yang ditemukan langsung di lapangan. Erma juga menegaskan bahwa fenomena penyimpangan semacam ini tidak hanya muncul di Indonesia, tetapi juga ditemukan kasus serupa di Malaysia.

Secara keseluruhan, film Bidaah bukan sekadar karya hiburan bernuansa Islam, melainkan sebuah kritik sosial-keagamaan. Film ini mendorong umat Islam untuk merefleksikan secara kritis praktik keberagamaan yang dijalankan selama ini dan mempertanyakan kesesuaiannya dengan prinsip syariat sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an, diteladankan oleh Nabi Muhammad Saw., dan diwariskan oleh para ulama (Ramadhan dkk., 2025). Dengan narasi yang bersumber dari realitas empiris, film ini berupaya mengungkap kecenderungan formalisme keagamaan yang dapat menyamarkan esensi ajaran. Pesan yang ingin disampaikan dari film tersebut yaitu menekankan pentingnya pemahaman Islam yang otentik, berbasis ilmu, dan tidak terjerat pada tradisi yang justru menyimpang dari nilai-nilai pokok agama.

Warisan Persia terlihat dalam pola budaya istana yang menempatkan stabilitas dan loyalitas personal di atas akuntabilitas publik, sebuah poin sentral dalam kritik al-Jabiri. Dalam film Bidaah pola kepatuhan total, seperti jama'ah yang mencuci kaki Walid, meminum air

bekas cucian kakinya, memperlihatkan bagaimana loyalitas pribadi menjadi mekanisme penghilangan kontrol publik. Tindakan seperti itu membuat posisi Walid dianggap suci sehingga sulit dikritik. Akibatnya hubungan antara jamaah dan Walid menjadi tidak seimbang, karena jamaah merasa tidak berhak mempertanyakan apa pun. Situasi seperti ini mendorong jamaah Jihad Ummah menjadi pasif dan menerima keputusan apa adanya. Pola ini menginternalisasi subordinasi, yaitu jamaah belajar untuk menjadikan ketaatan sebagai kebajikan, sementara hak dan kewajiban jamaah melemah.

Warisan Sufi dalam kerangka kritik al-Jabiri menonjolkan praktik fana atau dan penyerahan total yang dapat mendorong pembinasaan diri. Dalam data film, ritual-ritual seperti Malam Berkah dan Malam Bahtera Melayu tampak bukan hanya ekspresi religius privat tetapi juga mekanisme yang mereduksi keterlibatan publik. Ketika spiritualitas dipraktikkan sebagai pelarian dari persoalan kolektif, kapasitas jamaah untuk melakukan kritik dan memperjuangkan perubahan institusional menyusut. Praktik sufistik yang disertai otoritas karismatik mempermudah mobilisasi pasrah yang menerima keputusan pemimpin tanpa proses pertanggungjawaban. Hal ini terlihat ketika jama'ah perempuan menerima penetapan pasangan oleh Walid pada saat Malam Bahtera Melayu atau menerima perlakuan yang melanggar martabat dengan dalih berkah. Dengan demikian warisan Sufi tentang etika pembinasaan diri berfungsi sinergis dengan pola kepatuhan Persia untuk memproduksi subjek pasif, karena spiritualitas menjadi alibi bagi penarikan diri dari ranah sosial.

Warisan Yunani dipandang al-Jabiri sebagai sumber etika sipil yang berpotensi menghidupkan kebajikan publik, tetapi ia memperingatkan kerentanannya terhadap distorsi bila diserap dalam konteks institusional otoriter. Konsep kebahagiaan yang dihubungkan dengan kehidupan warga kota dapat berubah fungsi ketika dipadukan dengan budaya kepatuhan Persia. Alih-alih mendorong partisipasi publik, nilai-nilai itu dipakai untuk membenarkan dominasi. Dalam film, praktik amal seperti pendirian panti asuhan memang tampak sebagai tindakan positif, tetapi juga menjadi cara bagi Walid untuk membangun legitimasi. Hal ini menunjukkan bahwa kebajikan sosial tanpa mekanisme transparansi dan partisipasi dapat menjadi alat kontrol simbolik. Oleh karena itu warisan Yunani tidak secara otomatis menyuburkan etika publik, efektivitasnya bergantung pada keberadaan institusi yang terbuka terhadap akuntabilitas.

Warisan Arab murni yang berbentuk etika kesatria menawarkan modal moral yang berbeda: keberanian, kehormatan, dan tanggung jawab publik yang menegaskan martabat

kolektif. Dalam film, tindakan Baiduri menolak mencuci kaki Walid dan menumpahkan bekas air ke muka Walid merupakan performatif etika kesatria yang menolak penghinaan dan menunjukkan keberpihakan pada martabat. Langkah Baiduri mengorganisir nasihat bagi perempuan muda juga memanifestasikan dimensi pendidikan dan tanggung jawab kolektif dari tradisi ini. Etika kesatria menuntut kesiapan untuk mempertanyakan otoritas, melindungi yang lemah, dan menegakkan kebenaran; kualitas yang secara langsung menantang pasifisme warisan Persia dan pembinasaan diri sufistik. Namun etika ini tidak boleh berhenti pada heroisme individual, karena tanpa pedoman normatif yang jelas, keberanian berisiko menjadi aksi simbolik tanpa arah sosial.

Warisan Agama (Islam) menegaskan bahwa iman sejati harus terejawantahkan dalam amal sosial yang konkret. Dalam film, permainan legitimasi agama terlihat kontras: ceramah Hambali yang menekankan ketaatan hanya kepada Allah dan Rasul-Nya serta keluhan Masyitah tentang perilaku Walid memperlihatkan kebutuhan memisahkan legitimasi agama dari monopoli kekuasaan. Etika Qur'ani menuntut akuntabilitas moral yang nyata, sehingga iman tidak menjadi legitimasi bagi penyalahgunaan otoritas. Ketika etika Qur'ani digabungkan dengan semangat kesatria Arab (keberanian yang diarahkan oleh norma) terbuka kemungkinan membentuk jamaah yang berani, bertanggung jawab, dan berpijak pada prinsip kebenaran.

Dari perspektif al-Jabiri, kombinasi antara warisan Agama dan warisan Arab Murni adalah yang paling produktif untuk merevitalisasi ruang publik, seperti ijtihad rasional, institusi pengawas, dan partisipasi masyarakat yang berbasis norma Qur'ani serta etika kesatria. Analisis data film menegaskan bahwa pemulihan etika politik harus simultan: memperkuat pendidikan publik, membatasi monopoli legitimasi keagamaan, dan menumbuhkan mekanisme akuntabilitas agar warisan terbaik dapat menjadi motor perubahan sosial yang demokratis. Oleh karena itu etika kesatria perlu dipasangkan dengan kerangka nilai yang memberi tujuan publik sehingga energi moralnya dapat diarahkan pada pembangunan institusi yang adil. Hubungan inilah yang menjadi jembatan menuju peran etika Qur'ani sebagai penuntun normatif.

KESIMPULAN

Kajian ini menyimpulkan bahwa gagasan etika rasional Mohamed Abid al-Jabiri, khususnya pembacaannya atas lima warisan budaya, terbukti relevan untuk menafsirkan

dinamika etis yang ditampilkan dalam film Bidaah, karena film ini memvisualkan pola-pola penyimpangan etika yang ia kritik seperti ketaatan total yang berakar pada warisan Persia, praktik sufistik yang mendorong pembinasaan diri, serta hadirnya etika kesatria dan etika Qur'ani yang justru menawarkan arah keberagamaan yang lebih kritis dan terukur. Temuan ini secara langsung menjawab rumusan masalah dengan menunjukkan bahwa Bidaah tidak hanya memuat unsur dramatik, tetapi juga menampilkan mekanisme sosial keagamaan yang selaras dengan analisis al-Jabiri, sehingga tujuan penelitian untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk representasi etika problematik dalam film dapat tercapai. Secara keseluruhan, film Bidaah menunjukkan bahwa etika rasional al-Jabiri tetap relevan dalam membaca fenomena keberagamaan kontemporer dan membuka prospek penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara etika keagamaan, budaya populer, dan pembentukan kesadaran sosial.

Kajian ini berkontribusi secara akademik dengan memperluas penerapan pemikiran etika Mohamed Abid al-Jabiri ke ranah kajian film dan budaya populer, khususnya melalui analisis representasi etika keagamaan dalam film Bidaah. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya studi etika Islam kontemporer dengan menunjukkan relevansi konsep warisan-warisan etika al-Jabiri dalam membaca mekanisme legitimasi, pengkultusan, dan resistensi moral yang ditampilkan melalui medium visual. Dari sisi metodologis, artikel ini menawarkan model analisis interdisipliner yang mengintegrasikan filsafat etika dan analisis teks film, sehingga dapat direplikasi dalam penelitian serupa.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian dengan membandingkan film *Bidaah* dengan karya sinema atau media populer lain yang mengangkat tema otoritas dan praktik keagamaan, guna menguji konsistensi dan variasi representasi etika dalam konteks budaya yang berbeda. Selain itu, penelitian mendatang perlu melengkapi analisis tekstual dengan studi resepsi audiens untuk mengetahui bagaimana penonton memaknai representasi etika tersebut, apakah sebagai kritik terhadap otoritarianisme religius atau justru sebagai legitimasi simbolik. Dari sisi teoretis, kajian lanjutan dapat memperdalam dialog antara pemikiran Mohamed Abid al-Jabiri dan teori etika atau kritik budaya kontemporer lainnya, sehingga analisis etika keagamaan tidak berhenti pada deskripsi representasi, tetapi juga pada implikasi sosial dan praksis yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Jabiri, M. A. (2001). *Al-'Aql al-Akhlaqi al-'Arabi*. Markaz Dirasat al-Wahdah al-Arabiyah.

Al-Jabiri, M. A. (2003). *Kritik Pemikiran Islam: Wacana Baru Filsafat Islam* (Burhan, Trans.). Fajar Pustaka Baru.

Basayif, M. S. (2023). Nalar Etika Arab dalam Perspektif Abid Al-Jabiri. *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *2*(12), 5546–5559. https://doi.org/10.56799/jim.v2i12.2431

Belhaj, A. (2024). Happiness, virtue and wisdom: Elements of ancient Greek philosophy in Islamic advice literature. *IJoReSH: Indonesian Journal of Religion, Spirituality, and Humanity*, *3*(1), 53–75. https://doi.org/10.18326/ijoresh.v3i1.53-75

Denilza, I. A., & Muzakir, F. (2025). Instagram sebagai Arena Wacana Empati: Analisis Wacana Kritis terhadap Respons Publik atas Kesaksian Korban Film Bid'ah pada Akun @ctd.insider. *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, *4*(2), 156–170. https://doi.org/10.54259/mukasi.v4i2.4291

Faisol, M. (2010). Struktur Nalar Arab-Islam menurut Abid al-Jabiri. *Tsaqafah*, *6*(2), 335–359. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v6i2.124

Heravi, N. A. (2023). The impact of faith on social life. *Jami Scientific Research Quarterly Journal*, *8*(3), 75–92. https://doi.org/10.61438/jsrqj.v8i3.34

Khairina, A. I. (2016). Kritik Epistemologi Nalar Arab Muhammad Abed Al-Jabiri. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, *4*(1), 103–114. https://doi.org/10.35888/el-wasathiya.v4i1.2353

Marske, C. E. (1987). Durkheim's "Cult of the Individual" and the moral reconstitution of society. *Sociological Theory*, *5*(1), 1–14. https://doi.org/10.2307/201987

Muhamad, L. N. (2024). Kritik Epistemologi Nalar Arab Muhammad Abed Al-Jabiri terhadap Kemajuan Peradaban Islam. *Alhamra Jurnal Studi Islam*, *5*(2), 143–156. https://doi.org/10.30595/ajsi.v5i2.20451

Najmiah, F., & Ridho, S. (2025). Kultus Otoritas dan Resistensi dalam Representasi Keagamaan Film Bidaah: Kajian Media sebagai Ritual dalam Komunikasi Islam. *Jurnal Perspektif*, *9*(2), 465–489. https://doi.org/10.15575/jp.v9i2.393

Qosim, N., & Amin, N. (2025). Exploring the philosophy of life: Study of Muhammad Abed Al-Jabiri's thought in the context of modernity and tradition. *International Journal of Islamic Studies Issues*, *1*(1), 21–27. https://doi.org/10.59966/s6x8fb04

Ramadhan, S. A., Hilmy, M., & Erawati, D. (2025). Sarkasme Film Series Bidaah bagi Praktik Keagamaan Umat Islam di Indonesia: Tinjauan Teori Sosiologi Agama. *Intizar*, *31*(1), 22–30. https://doi.org/10.19109/intizar.v31i1.27688

Ridwan, D. (2025, May 4). *Video: Serial 'Bidaah' Bakal Tayang di Transvision Bulan Juni* [Video]. 20Detik. https://20.detik.com/detikupdate/20250504-250504064/video-serial-bidaah-bakal-tayang-di-transvision-bulan-juni

Schmidt, S. (2025). *Responsibility for rationality: Foundations of an ethics of mind* (1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003382973

Soleh, A. K. (2003). *Pemikiran Islam Kontemporer*. Jendela.

Thibdeau, J. C. (2025). Enacting mysticism in the world: Practical Sufism in the Tariqa Karkariyya and Alawiyya. *Religions*, *16*(2), 111. https://doi.org/10.3390/rel16020111

Zuhri, H. (2008). Dari al-Jabiri tentang Nalar Etika Islam. *Refleksi Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam*, *8*(1), 56–74. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/29266/